



2025 LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. LKjIP ini merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Batam atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Batam visi dan misi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan pemacu peningkatan kinerja yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Secara umum capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2025 telah mampu membantu Kota Batam sebagai kota dengan perkembangan pembangunan daerah yang progresif. Hal ini berkat dukungan sumber daya dan pihak terkait dalam proses pencapaian kinerja. Namun terlepas dari itu, terdapat beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang

perlu dimaksimalkan lagi guna melampaui target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap capaian atas kinerja yang diperjanjikan dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa yang akan datang. Kami sadar bahwa kinerja dari Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dituntut untuk terus terus meningkat, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan pada periode selanjutnya.

Batam, 18 Februari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam



Raja Azmansyah
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025. Badan Pendapatan Daerah Kota Batam memiliki 4 (empat) IKU yang terdiri dari :

1. 1 (satu) IKU dari indikator kinerja tujuan strategis;
2. 3 (tiga) IKU dari indikator kinerja sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 4 (empat) target IKU tersebut, dapat dilihat kriteria kinerja sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) indikator tercapai pada interval capaian $>90\%$ s.d $\leq 100\%$ dengan kriteria kinerja “**Sangat Tinggi**” yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah;
2. Terdapat 3 (tiga) indikator tidak tercapai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Derajat Fiskal Otonomi Daerah dengan capaian 98,39% sehingga berada pada interval capaian $>90\%$ s.d. $\leq 100\%$ dengan kriteria kinerja “**Sangat Tinggi**”;
 - b. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan capaian 82,98% sehingga berada pada interval capaian $>75\%$ s.d. $\leq 90\%$ dengan kriteria kinerja “**Tinggi**”;
 - c. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Batam dengan capaian 96,95% sehingga berada pada interval capaian $>90\%$ s.d. $\leq 100\%$ dengan kriteria kinerja “**Sangat Tinggi**”.

Secara umum capaian seluruh IKU menunjukkan perkembangan yang positif jika dibandingkan dengan tahun 2024 meskipun masih terdapat 3 (tiga) dari 4 (empat) indikator belum mencapai target yang diharapkan. Pencapaian tersebut

disebabkan karena tidak maksimalnya penerimaan daerah pada beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dampak negatif dari perubahan kebijakan pemerintah daerah, penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, dan rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi yang tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian IKU di atas memiliki kriteria kinerja tinggi hingga sangat tinggi karena tidak terlepas dari dilaksanakannya 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) indikator tidak tercapai pada interval capaian $>90\%$ s.d $\leq 100\%$ dengan kriteria kinerja “**Sangat Tinggi**” yaitu Nilai SAKIP PD. Dimana realisasi kinerja 70,97 dari target 71,82 atau capaian sebesar 98,82%;
2. Terdapat 1 (satu) indikator tercapai pada interval capaian $>90\%$ s.d $\leq 100\%$ dengan kriteria kinerja “**Sangat Tinggi**” yaitu Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD. Dimana realisasi kinerja 91,46 dari target 91,10 atau capaian sebesar 100,40%.

Nilai SAKIP PD yang tidak tercapai ini dipengaruhi oleh adanya beberapa catatan dari Inspektorat Daerah untuk melakukan peningkatan pada beberapa hal diantaranya terkait pemantauan atas rencana aksi serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

Sementara dari kegiatan yang berada di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 5 (lima) dari 6 (enam) indikator kinerja kegiatan tercapai pada interval capaian $>90\%$ s.d $\leq 100\%$ dengan kriteria kinerja “**Sangat Tinggi**” dengan capaian kinerja 100%, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja tidak tercapai pada interval capaian $>90\%$ s.d

≤100% dengan kriteria kinerja “**Sangat Tinggi**” dengan capaian kinerja 99,47%. Hal ini dikarenakan adanya rencana pengadaan belanja modal yang tidak bisa direalisasikan yang disebabkan barang dari pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah diketahui bahwa 4 (empat) dari 5 (lima) indikator kinerja tidak tercapai dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih tercapai pada interval capaian >90% s.d ≤100% dengan kriteria kinerja “**Sangat Tinggi**”. Dimana realisasi kinerja 12,17% dari target 10% atau capaian sebesar 121,70%;
2. Indikator kinerja Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target tidak tercapai pada interval capaian >90% s.d ≤100% dengan kriteria kinerja “**Sangat Tinggi**”. Dimana realisasi kinerja 96,48% dari target 98% atau capaian sebesar 98,45%;
3. Indikator kinerja Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah tidak tercapai pada interval capaian ≤50% dengan kriteria kinerja “**Sangat Rendah**”. Dimana realisasi kinerja 1,99% dari target 25,98% atau capaian sebesar 7,66%;
4. Indikator kinerja Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment tidak tercapai pada interval capaian >75% s.d ≤90% dengan kriteria kinerja “**Tinggi**”. Dimana realisasi kinerja 13,24% dari target 16,73% atau capaian sebesar 79,14%;
5. Indikator kinerja Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment tidak tercapai pada interval capaian >75% s.d ≤90% dengan kriteria kinerja “**Tinggi**”. Dimana realisasi kinerja 12,15% dari target 16,09% atau capaian sebesar 75,51%.

Sedangkan dari kegiatan yang berada di bawah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, seluruh indikator kinerja kegiatan tercapai, dan berada pada interval capaian >90% s.d ≤100% dengan kriteria kinerja **“Sangat Tinggi”** dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah Official Assessment tercapai pada interval capaian >90% s.d ≤100% dengan kriteria kinerja **“Sangat Tinggi”**. Dimana realisasi kinerja 12,12% dari target 2,76% atau capaian sebesar 439,13%;
2. Indikator kinerja Rasio Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah tercapai pada interval capaian >90% s.d ≤100% dengan kriteria kinerja **“Sangat Tinggi”**. Dimana realisasi kinerja 121,70% dari target 100% atau capaian sebesar 121,70%;
3. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah Yang Dihasilkan tercapai pada interval capaian >90% s.d ≤100% dengan kriteria kinerja **“Sangat Tinggi”**. Dimana realisasi kinerja 2 dokumen dari target 2 dokumen atau capaian sebesar 100%;
4. Indikator kinerja Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah self assessment tercapai pada interval capaian >90% s.d ≤100% dengan kriteria kinerja **“Sangat Tinggi”**. Dimana realisasi kinerja 3,55% dari target 0,77% atau capaian sebesar 461,04%.

Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada APBD-P tahun anggaran 2025 sebesar Rp 56.929.727.456, berkurang sebesar 1,42% dari anggaran belanja penetapan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 57.747.432.939. Selama menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah

pemungut pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada tahun 2025 berhasil melakukan serapan anggaran belanja sebesar Rp 52.274.775.525 atau 91,82%.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu diperlukan upaya dan sinergitas dari semua pihak untuk mewujudkan harapan tersebut. Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.3 Isu Strategis.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Penjenjangan Strategis.....	11
2.2 Indikator Kinerja Utama	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Pengukuran Kinerja	26
3.2 Analisa Kinerja.....	32
3.3 Prestasi Kinerja Lainnya	71
3.4 Akuntabilitas Anggaran	72
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenis Jabatan	6
Tabel 1.2	Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pangkat dan Golongan	6
Tabel 1.3	Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Kelas Jabatan	7
Tabel 1.4	Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.5	Data ASN Berdasarkan Unit Kerja.....	7
Tabel 2.1	Matriks Penjenjangan Strategis	13
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.....	24
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	25
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	28
Tabel 3.3	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	29
Tabel 3.4	Perhitungan Capaian Derajat Fiskal Otonomi Daerah	32
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025	33
Tabel 3.6	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025	33
Tabel 3.7	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025	34
Tabel 3.8	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025	35
Tabel 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1 Tahun 2024 dan 2025	36
Tabel 3.10	Tingkat Pertumbuhan PAD Tahun 2025.....	37
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 Tahun 2024 dan 2025	38
Tabel 3.12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Batam	40
Tabel 3.13	Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3 Tahun 2024 dan 2025	41
Tabel 3.14	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah	42
Tabel 3.15	Perbandingan Target dan Realisasi IKU 4 Tahun 2024 dan 2025	43
Tabel 3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2024 dan 2025	44
Tabel 3.17	Capaian Piutang Pajak Daerah yang Tertagih Tahun 2024 dan 2025	47
Tabel 3.18	Pertumbuhan Indikator Kinerja ke-1 pada Program Teknis Tahun 2025.....	48

Tabel 3.19	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2025	49
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja ke-2 pada Program Teknis Tahun 2025	49
Tabel 3.21	Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2025.....	50
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja ke-3 pada Program Teknis Tahun 2025	51
Tabel 3.23	Realisasi Pajak Daerah Official Assessment Tahun 2024 dan 2025	51
Tabel 3.24	Capaian Indikator Kinerja ke-4 pada Program Teknis Tahun 2025	52
Tabel 3.25	Realisasi Pajak Daerah Self Assessment Tahun 2024 dan 2025	53
Tabel 3.26	Capaian Indikator Kinerja ke-5 pada Program Teknis Tahun 2025	54
Tabel 3.27	Realisasi Jumlah Wajib Pajak Daerah Official Assessment Tahun 2025	54
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja ke-1 pada Kegiatan Teknis Tahun 2025	55
Tabel 3.29	Capaian Piutang Pajak Daerah yang Tertagih Tahun 2025	56
Tabel 3.30	Capaian Indikator Kinerja ke-2 pada Kegiatan Teknis Tahun 2025	56
Tabel 3.31	Capaian Indikator Kinerja ke-3 pada Kegiatan Teknis Tahun 2025	57
Tabel 3.32	Realisasi Jumlah Wajib Pajak Daerah Self Assessment Tahun 2025	57
Tabel 3.33	Capaian Indikator Kinerja ke-4 pada Kegiatan Teknis Tahun 2025	58
Tabel 3.34	Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Bapenda Tahun 2025	59
Tabel 3.35	Sistem Informasi Pajak Daerah	60
Tabel 3.36	Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kanal Pembayaran Pajak Daerah	61
Gambar 3.2 Gambaran Pendanaan Bapenda Tahun 2025	73
Gambar 3 3 Pembagian Pendanaan Bapenda Tahun 2025	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan daerah harus diimbangi dengan dukungan keuangan yang memadai. Salah satu aspek penting dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memegang peranan penting yaitu diantaranya sebagai sumber utama pendapatan, indikator kemandirian keuangan daerah, sumber pembiayaan pembangunan dan layanan publik, menjamin keberlanjutan, dan efisiensi pengelolaan keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Batam bertanggung jawab atas pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peranan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan dengan transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah harus disertai rencana tindak lanjut (*action plan*) yang jelas serta implementasinya harus secara konkret dan konsekuen sehingga dapat menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan, penyediaan pelayanan

publik, dan menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi secara lebih baik. Dengan demikian, upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dapat membawa kontribusi dan implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Badan Pendapatan Daerah harus mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Langkah yang perlu dilakukan untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel itu menyusun LKjIP guna memberikan gambaran capaian kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kepada publik sebagai pemberi mandat.

LKjIP ini sendiri selain sebagai dokumen pelaporan kinerja, namun juga bisa digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik, karena dalam dokumen LKjIP ini termuat catatan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya.

1.2 Gambaran Umum

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah, diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam. Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan

Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

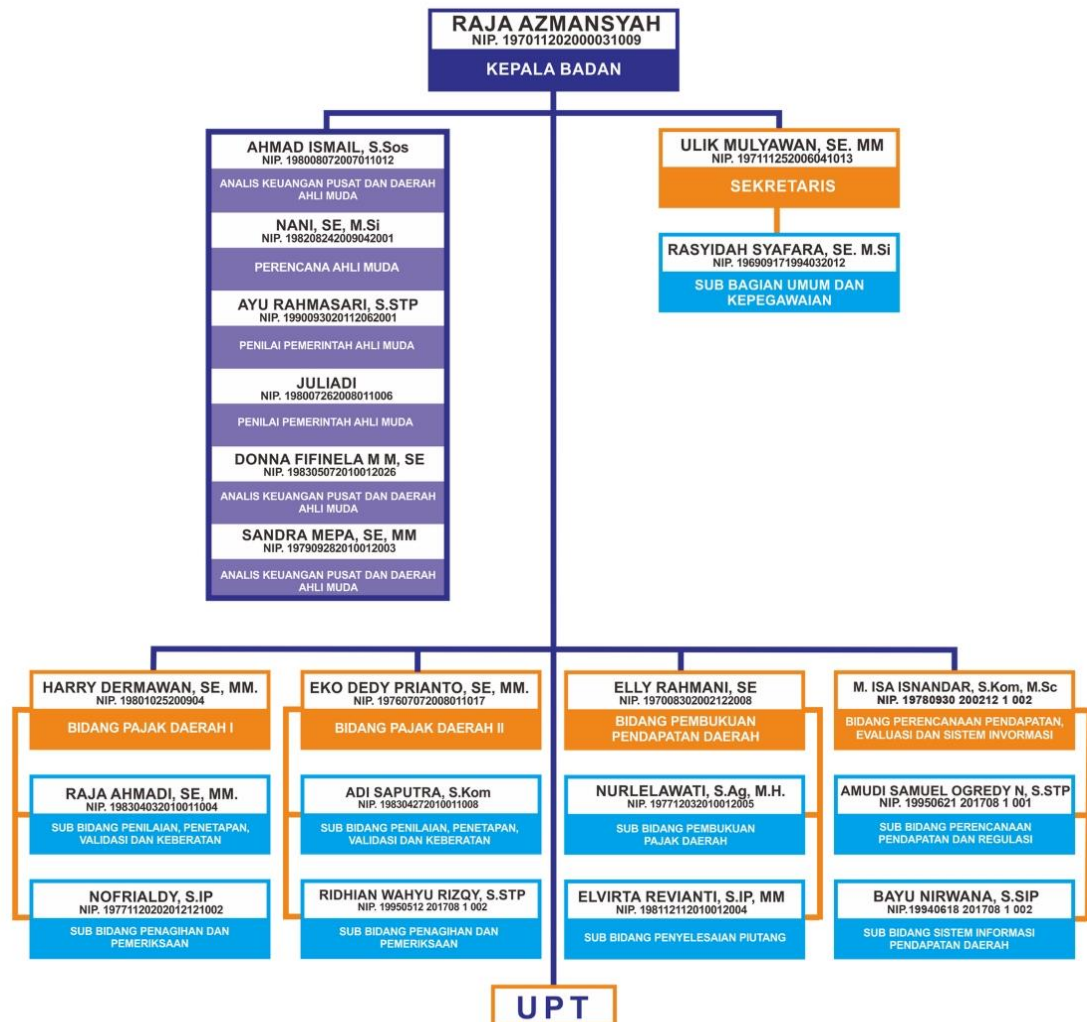
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan di bidang pendapatan daerah.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pajak Daerah I, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan;

- b. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan.
- 4. Bidang Pajak Daerah II, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan;
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan.
- 5. Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Penyelesaian Piutang.
- 6. Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
 - b. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam



b. Sumber Daya Organisasi

1. Kondisi Umum Pegawai

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 memiliki sumber daya manusia dengan jumlah 206 (dua ratus enam) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 102 (seratus dua) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 104 (seratus empat) orang.

Tabel 1.1
Data Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Jabatan	Lk	Pr	Jumlah
1	Jabatan Struktural	11	4	15
2	Jabatan Fungsional	61	50	111
3	Jabatan Pelaksana	51	29	80
TOTAL		123	83	206

Tabel 1.2
Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat – Gol. Ruang	Lk	Pr	Jumlah
1	Pembina Utama- IV/e	0	0	0
2	Pembina Utama Madya - IV/d	0	0	0
3	Pembina Utama Muda - IV/c	1	0	1
4	Pembina Tingkat I - IV/b	1	1	2
5	Pembina - IV/a	4	4	8
6	Penata Tingkat I - III/d	8	16	24
7	Penata - III/c	14	4	18
8	Penata Muda Tingkat I - III/b	9	7	16
9	Penata Muda - III/a	18	4	22
10	Pengatur Tingkat I - II/d	5	2	7
11	Pengatur - II/c	1	0	1
12	Pengatur Muda Tingkat I - II/b	0	0	0

No.	Pangkat – Gol. Ruang	Lk	Pr	Jumlah
13	Pengatur Muda - II/a	3	0	3
14	Juru Tingkat I - I/d	0	0	0
15	Juru - I/c	0	0	0
16	Juru Muda Tingkat I - I/b	0	0	0
17	Juru Muda - I/a	0	0	0
TOTAL		64	38	102

Tabel 1.3
Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Kelas Jabatan

No.	Pangkat – Gol. Ruang	Lk	Pr	Jumlah
1	Kelas I	1	0	1
2	Kelas III	1	0	1
3	Kelas V	31	11	42
4	Kelas VII	5	2	7
5	Kelas IX	21	32	53
TOTAL		59	45	104

Tabel 1.4
Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	Jumlah
1	Doktor (S3)	0	0	0
2	Magister (S2)	19	0	19
3	Sarjana (S1)	40	40	80
4	Diploma IV (D4)	4	13	17
5	Diploma III (D3)	7	7	14
6	Diploma II (D2)	0	0	0
7	Diploma I (D1)	0	0	0
8	SMA/SMK	31	42	73
9	SMP	1	1	2
10	SD	0	1	1
TOTAL		102	104	206

Tabel 1.5
Data ASN Berdasarkan Unit Kerja

No.	Bidang	PNS	PPPK	Jumlah
1	Kepala Badan	1	0	1
2	Sekretariat	18	11	29

No.	Bidang	PNS	PPPK	Jumlah
3	Bidang Pajak Daerah I	30	40	70
4	Bidang Pajak Daerah II	24	30	54
5	Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	18	11	29
6	Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi	11	12	23
TOTAL		102	104	206

1.3 Isu Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 yakni meningkatkan kemandirian pembangunan daerah, dapat dirumuskan 6 (enam) isu strategis yang perlu dihadapi dan diselesaikan diantaranya:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan optimalisasi pajak terutama dalam hal kegiatan pendataan, penertiban, dan penagihan pajak daerah;
3. Belum optimalnya pemetaan dan penyediaan data dukung dalam menghitung potensi penerimaan retribusi daerah di masing masing OPD penghasil;
4. Saat ini regulasi pajak daerah masih menggunakan peraturan/regulasi yang lama;
5. Belum terselesaikannya proses perbaikan dan updating data WP PBB dari proses peralihan pajak pusat menjadi pajak daerah;
6. Belum adanya SDM fungsional juru sita, penilai pajak, dan pemeriksa pajak.

Isu-isu strategis di atas harus segera diselesaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, karena hal tersebut sangat mempengaruhi capaian Pendapatan Asli Daerah. Dampak yang ditimbulkan apabila isu-isu di atas tidak terselesaikan tentu sangat luas, dari mulai terhambatnya proses pembangunan proyek strategis, efisiensi anggaran belanja, penurunan kualitas pelayanan publik, ketergantungan dana transfer pusat meningkat, dll.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam perlu merumuskan langkah-langkah strategis untuk dapat mengoptimalisasikan pendapatan daerah melalui kegiatan:

1. Sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak;
2. Pemberian stimulus pajak daerah;
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mempermudah pelayanan publik;
4. Penyelenggaraan kajian potensi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Melakukan evaluasi terhadap regulasi perpajakan yang digunakan;
6. Mengikuti pendidikan dan pelatihan juru sita, penilai dan pemeriksa pajak untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
7. Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak;
8. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
9. Peningkatan penerapan sanksi secara tegas terhadap pelaku pelanggaran peraturan hukum yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Penjenjangan Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Pengukuran Kinerja
- 3.2 Analisa Kinerja
- 3.3 Prestasi Kinerja Lainnya
- 3.4 Akuntabilitas Kinerja

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penjenjangan Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, Kota Batam memiliki Visi:

**“BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF,
BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT
INVESTASI DAN PARIWISATA”**

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kota Batam memiliki 5 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuh kembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global;
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*;
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dengan tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendapatan Daerah memiliki 1 visi yang sama dengan visi Kota Batam dan mengampu misi ke-4 dari misi Kota Batam yaitu:

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Good
Governance”**

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel 2.1
Matriks Penjenjangan Strategis

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Daerah				Derajat Fiskal Otonomi Daerah (Persentase)	48,52	52,83	55,25	56.931.827.456	54,03	61.613.163.764	53,64	66.813.174.913	53,20	71.339.011.788	52,83	77.651.204.741	52,58	84.633.948.055		
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah			Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Persentase)	15,67	6,72	33,01	5.833.486.000	6,30	6.519.888.700	6,92	10.686.579.000	6,79	11.396.796.000	6,72	13.996.577.000	6,62	15.996.434.000		
				Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Batam (Persentase)	0,604	0,768	0,783	3.385.094.000	0,779	2.319.175.700	0,775	3.157.713.000	0,772	3.895.157.000	0,768	5.350.659.000	0,765	8.851.655.000		
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					9.218.580.000		8.839.064.400		13.844.292.000		15.291.953.000		19.347.236.000		24.848.089.000	66.541.125.400		
		Meningkatnya piutang pajak Daerah yang tertagih	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih (Dengan Satuan:Persentase)	10	10	10	483.000.000	10	497.950.000	10	547.744.000	10	662.769.000	10	1.029.045.000	10	1.070.206.000		Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target (Dengan Satuan:Persentase)	98	98	98	3.385.094.000	98	2.319.175.700	98	3.157.713.000	98	3.895.157.000	98	5.350.659.000	98	8.851.655.000		Bidang Pengembangan Evaluasi Dan Sistem Informasi (PEVSI)	
		Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	20,81	10,76	25,98	0	4,96	46.882.000	13,55	51.570.000	12,20	62.399.000	10,76	268.638.000	9,69	479.383.000		Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya penerimaan pajak daerah official assesment	Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assesment (Dengan Satuan:Persentase)	12,12	6,50	16,73	3.794.341.000	6,50	3.343.747.900	6,50	3.712.770.000	6,50	4.218.490.000	6,50	5.350.443.000	6,50	6.364.457.000		Bidang Pajak Daerah I	
		Meningkatnya penerimaan pajak daerah self assesment	Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assesment (Dengan Satuan:Persentase)	22,16	6,50	16,09	1.556.145.000	6,50	2.631.308.800	6,50	6.374.495.000	6,50	6.453.138.000	6,50	7.348.451.000	6,50	8.082.388.000		Bidang Pajak Daerah II	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.218.580.000		8.839.064.400		13.844.292.000		15.291.953.000		19.347.236.000		24.848.089.000	66.541.125.400		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya Wajib Pajak Daerah official assesment	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah official assesment (Dengan Satuan:Persentase)	2,76	2,85	2,76	3.794.341.000	2,76	3.343.747.900	2,83	3.712.770.000	2,84	4.218.490.000	2,85	5.350.443.000	2,79	6.364.457.000		Kepala Bidang Pajak Daerah I
			Meningkatnya Capaian Piutang Pajak Daerah yang tertagih	Rasio Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	NA	100	100	483.000.000	100	497.950.000	100	547.744.000	100	662.769.000	100	1.029.045.000	100	1.070.206.000		Kepala Bidang P e m b u k u a n Pendapatan Daerah
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendapatan yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah Yang Dihasilkan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	9	2	3.385.094.000	4	2.319.175.700	4	3.157.713.000	4	3.895.157.000	4	5.350.659.000	4	8.851.655.000		Kepala Bidang P e r e n c a n a a n Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi
			Meningkatnya Koordinasi dengan OPD Penghasil Retribusi	Persentase Koordinasi dengan OPD Penghasil Retribusi (Dengan Satuan:Persentase)	NA	100	NA	0	100	46.882.000	100	51.570.000	100	62.399.000	100	268.638.000	100	479.383.000		Kepala Bidang P e m b u k u a n Pendapatan Daerah
			Meningkatnya Wajib Pajak Daerah self assesment	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah self assesment (Dengan Satuan:Persentase)	0,77	1,05	0,77	1.556.145.000	0,90	2.631.308.800	1,03	6.374.495.000	1,05	6.453.138.000	1,05	7.348.451.000	1,01	8.082.388.000		Kepala Bidang Pajak Daerah II
	5.02.04.2.01.0001		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				0			131.006.000		321.741.000		389.306.000		428.236.000		745.365.000	1.270.289.000	
			Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	0		1		1		1		1		1			Kepala Sub Bidang P e r e n c a n a a n Pendapatan dan Regulasi
	5.02.04.2.01.0002		A n a l i s a dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					388.075.000		296.300.000		562.918.000		681.130.000		749.243.000		1.279.212.000	2.677.666.000	
			Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		1			Kepala Sub Bidang P e r e n c a n a a n Pendapatan dan Regulasi
	5.02.04.2.01.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					2.997.019.000		1.770.461.900		2.124.554.000		2.645.036.000		3.475.527.000		5.701.519.000	13.012.597.900	
			Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	14	12		4		14		14		14		14			Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang PEVSI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					1.404.000.000		2.379.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		6.100.000.000		6.200.000.000	21.883.000.000	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Unit)	602	1000	602		602		1000		1000		1000		1000			Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					1.240.558.000		589.011.300		686.628.000		830.819.000		913.900.000		950.456.000	4.260.916.300	
			Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		12			Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					1.745.100.000		1.630.712.000		1.712.247.000		1.797.859.000		1.887.751.000		1.963.260.000	8.773.669.000	
			Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	30	10	10		10		10		10		10		10			Kepala Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0		825.912.000		908.503.000		1.099.288.000		1.409.216.000		1.465.583.000	4.242.919.000	
			Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Dengan Satuan:Obyek Pajak)	0	10000	0		10000		10000		10000		10000		10000			Kepala Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					61.920.000		61.920.000		113.300.000		137.093.000		350.802.000		764.834.000	725.035.000	
			Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Dengan Satuan:Layanan)	9	9	9		9		9		9		9		9			Penilai Pemerintah Ahli Muda Pajak Daerah I
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					746.763.000		236.192.600		292.092.000		353.431.000		788.774.000		1.220.324.000	2.417.252.600	
			Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	17	17	17		17		17		17		17		17			Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah					483.000.000		497.950.000		547.744.000		662.769.000		1.029.045.000		1.070.206.000	3.220.508.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		17		17		17		17		17			Kepala Sub Bidang Penyelesaian Piutang
	5.02.04.2.01.0012		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					0		99.991.000		110.000.000		133.100.000		546.410.000		968.266.000	889.501.000	
			Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	12	0		12		12		12		12		12			Kepala Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II
	5.02.04.2.01.0013		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					152.145.000		152.317.800		264.495.000		320.038.000		702.041.000		914.122.000	1.591.036.800	
			Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		12			Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II
	5.02.04.2.01.0014		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					0		46.882.000		51.570.000		62.399.000		268.638.000		479.383.000	429.489.000	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	4	0		4		4		4		4		4			Kepala Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah
	5.02.04.2.01.0015		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					0		121.407.800		148.500.000		179.685.000		697.653.000		1.125.559.000	1.147.245.800	
			Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	4	0		4		4		4		4		4			Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah
	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Badan Pendapatan Daerah (Poin)	89,93	90,25	90,13	47.713.247.456	90,16	52.774.099.364	90,19	52.968.882.913	90,22	56.047.058.788	90,25	58.303.968.741	90,29	59.785.859.055		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					47.713.247.456		52.774.099.364		52.968.882.913		56.047.058.788		58.303.968.741		59.785.859.055	267.807.257.262	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,08	78,57	71,82	0	73,57	29.321.800	74,57	32.400.000	76,57	35.700.000	78,57	39.200.000	80,57	43.200.000		Sekretaris
				Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,70	92,70	91,10	47.713.247.456	91,50	52.744.777.564	92,00	52.936.482.913	92,35	56.011.358.788	92,70	58.264.768.741	93,00	59.742.659.055		Sekretaris
	5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		29.321.800		32.400.000		35.700.000		39.200.000		43.200.000	136.621.800	
			Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Badan Pendapatan Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	0	100	0	0	100	29.321.800	100	32.400.000	100	35.700.000	100	39.200.000	100	43.200.000		Sekretaris.
	5.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0		18.541.600		20.400.000		22.500.000		24.700.000		27.200.000	86.141.600	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	15	0		2		3		2		2		3			Perencana Ahli Muda
	5.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		10.780.200		12.000.000		13.200.000		14.500.000		16.000.000	50.480.200	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	17	0		3		3		3		3		3			Perencana Ahli Muda
	5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					39.349.294.796		46.067.519.040		47.238.037.913		48.429.066.788		49.648.288.741		50.889.497.055	230.732.207.278	
			Terlaksananya layanan administrasi keuangan Badan Pendapatan Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	39.349.294.796	100	46.067.519.040	100	47.238.037.913	100	48.429.066.788	100	49.648.288.741	100	50.889.497.055		Sekretaris.
	5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					39.282.894.796		46.001.119.040		47.150.389.913		48.329.148.788		49.537.380.741		50.775.817.055	230.300.933.278	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	131	210	207		210		210		210		210		210			Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sekretariat)
	5.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					66.400.000		66.400.000		87.648.000		99.918.000		110.908.000		113.680.000	431.274.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		12			Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sekretariat)
	5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					463.703.000		602.873.800		449.345.000		512.253.000		568.600.000		582.814.000	2.596.774.800	
			Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN Badan Pendapatan Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	463.703.000	100	602.873.800	100	449.345.000	100	512.253.000	100	568.600.000	100	582.814.000		Sekretaris.
	5.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					271.340.000		90.997.200		143.000.000		163.020.000		180.952.000		185.475.000	849.309.200	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	3		3		3		3		3		3			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	5.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		511.876.600		306.345.000		349.233.000		387.648.000		397.339.000	1.555.102.600	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	75	0		130		60		65		70		75			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	5.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					192.363.000		0		0		0		0		0	192.363.000	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	56	73	17		0		0		0		0		0			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.211.803.500		2.551.152.525		2.589.221.000		2.914.956.000		3.470.705.000		3.557.469.000	13.737.838.025	
			Terlaksananya layanan administrasi umum Badan Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	2.211.803.500	100	2.551.152.525	100	2.589.221.000	100	2.914.956.000	100	3.470.705.000	100	3.557.469.000		Sekretaris.
	5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					29.535.000		40.287.500		26.231.000		29.903.000		33.192.000		34.021.000	159.148.500	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1		1		1		1		1		1			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					557.441.500		835.329.125		918.861.000		1.010.747.000		1.234.291.000		1.265.148.000	4.556.669.625	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	8	9	9		10		9		9		9		9			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan					554.262.000		546.408.300		731.625.000		834.052.000		925.797.000		948.941.000	3.592.144.300	
			Tersedianya Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		4			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					7.200.000		7.881.600		9.504.000		10.834.000		12.025.000		12.325.000	47.444.600	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	48	1	1		1		1		1		1		1			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.063.365.000		1.121.246.000		903.000.000		1.029.420.000		1.265.400.000		1.297.034.000	5.382.431.000	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		12			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.242.622.000		1.864.447.799		596.688.000		1.803.047.000		1.966.416.000		2.036.854.000	8.473.220.799	
			Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang BMD Badan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	2.242.622.000	100	1.864.447.799	100	596.688.000	100	1.803.047.000	100	1.966.416.000	100	2.036.854.000		Sekretaris.
		5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					484.095.000		0		0		0		0		0	484.095.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	1		0		0		0		0		0			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0		974.706.000		0		674.294.000		713.502.000		752.619.000	2.362.502.000	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	23	27	0		2		0		1		1		1			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						281.724.000		241.066.700		325.389.000		370.943.000		411.746.000		422.039.000	1.630.868.700	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	202	402	46		34		40		40		40		40			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.476.803.000		350.608.100		271.299.000		309.280.000		343.300.000		351.882.000	2.751.290.100	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	284	445	77		31		15		17		21		22			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		298.066.999		0		448.530.000		497.868.000		510.314.000	1.244.464.999	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	0		1		0		1		1		1			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.243.132.160		596.800.000		656.370.000		748.261.000		830.569.000		851.332.000	5.075.132.160	
			Tersedianya jasa penunjang urusan Badan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	2.243.132.160	100	596.800.000	100	656.370.000	100	748.261.000	100	830.569.000	100	851.332.000		Sekretaris.
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						594.900.000		595.300.000		654.390.000		746.004.000		828.064.000		848.765.000	3.418.658.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		12			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.648.232.160		1.500.000		1.980.000		2.257.000		2.505.000		2.567.000	1.656.474.160	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		12			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.202.692.000		1.061.984.400		1.406.821.000		1.603.775.000		1.780.190.000		1.824.693.000	7.055.462.400	
			Terlaksananya pemeliharaan BMD Badan Pendapatan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	1.202.692.000	100	1.061.984.400	100	1.406.821.000	100	1.603.775.000	100	1.780.190.000	100	1.824.693.000		Sekretaris.
		5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		40.880.000		58.924.000		67.173.000		74.562.000		76.426.000	241.539.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	1	0		1		1		1		1		1			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					594.330.000		636.280.000		839.889.000		957.473.000		1.062.795.000		1.089.364.000	4.090.767.000	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	23	26	23		24		24		25		26		27			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					308.795.000		384.824.400		508.008.000		579.129.000		642.833.000		658.903.000	2.423.589.400	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	275	432	291		302		379		417		432		449			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
		5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					299.567.000		0		0		0		0		0	299.567.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Kondisi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0	1		0		0		0		0		0			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
TOTAL:							56.931.827.456		61.613.163.764		66.813.174.913		71.339.011.788		77.651.204.741		84.633.948.055		334.348.382.662	

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah selama periode Renstra. IKU ditetapkan sebagai alat ukur kinerja yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan. IKU berfungsi sebagai dasar dalam pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi, pengambilan keputusan, serta perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui IKU, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh sumber daya, program, dan kegiatan diarahkan untuk mencapai hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, IKU juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja kepada pemangku kepentingan dan publik. Dengan adanya IKU, diharapkan pelaksanaan strategi pembangunan dapat diukur secara objektif dan konsisten, sehingga mendukung tercapainya visi dan misi secara efektif dan efisien.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Target Kinerja					Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029		
Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Daerah		Derajat Fiskal Otonomi Daerah	Tingkat kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahannya dengan sumber PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerahnya.	55,25%	54,03%	53,64%	53,20%	52,83%	Jumlah PAD tahun (n) dibagi dengan jumlah Pendapatan Daerah tahun (n)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase kenaikan atau penurunan nilai PAD dari satu periode ke periode berikutnya	33,01%	6,30%	6,92%	6,79%	6,72%	Jumlah PAD tahun (n) dikurangi jumlah PAD tahun (n-1) dibagi jumlah PAD tahun (n-1) dikali 100	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
		Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Batam	PDRB merupakan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan Kota Batam dalam periode tertentu. PDRB yang dipakai adalah PDRB Tahunan menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku	0,783%	0,779%	0,775%	0,772%	0,768%	Jumlah Pajak Daerah tahun (n) dibagi PDRB tahun (n) dikali 100	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Data Publikasi BPS.
	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah	Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Bapenda Kota Batam yang diperoleh dari survei layanan wajib pajak dengan menggunakan data kuantitatif.	90,13%	90,16%	90,19%	90,22%	90,25%	Jumlah nilai kuesioner dibagi jumlah responden dibagi jumlah unsur pertanyaan pada kuesioner dikali 25*	Kuesioner survei kepuasan masyarakat

* Skala nilai yang digunakan untuk menilai setiap unsur pertanyaan pada kuesioner di rentang 1-4, sehingga untuk mendapatkan nilai maksimal 100 perlu dikalikan 25

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mengintegrasikan perencanaan strategis dengan implementasi program kerja yang lebih akuntabel dan transparan. Seluruh indikator dan target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Tingkat Pertumbuhan PAD	33,01%
		2. Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0,783%
2.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	90,13

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 47.708.282.456	P-APBD 2025
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 9.221.445.000	P-APBD 2025
Jumlah Anggaran		Rp. 56.929.727.456	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Batam. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Capaian kinerja yang telah dihitung kemudian perlu diinterpretasikan dengan menggunakan interval dan kriteria capaian kinerja agar memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Adapun rumus pengukuran kinerja yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

mempunyai makna semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, begitu sebaliknya apabila semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja. Interval dan kriteria capaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1	>90% s.d ≤100%	Sangat tinggi
2	>75% s.d ≤90%	Tinggi
3	>65% s.d ≤75%	Sedang
4	>50% s.d ≤65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Untuk dapat menganalisis hasil dari pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, berikut ditampilkan hasil capaian dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2025:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Kinerja	Sumber Data
Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Daerah		Derajat Fiskal Otonomi Daerah	Jumlah PAD tahun (n) dibagi dengan jumlah Pendapatan Daerah tahun (n) dikali 100	55,25%	54,36%	98,39%	Sangat Tinggi	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah PAD tahun (n) dikurangi jumlah PAD tahun (n-1) dibagi jumlah PAD tahun (n-1) dikali 100	33,01%	27,39%	82,98%	Tinggi	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
		Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Batam	Jumlah Pajak Daerah tahun (n) dibagi PDRB tahun (n) dikali 100	0,783%	0,759%	96,95%	Sangat Tinggi	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Data Publikasi BPS.
	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah	Jumlah nilai kuesioner dibagi jumlah responden dibagi jumlah unsur pertanyaan pada kuesioner dikali 25*	90,13%	90,13%	100%	Sangat Tinggi	Kuesioner survei kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 capaian IKU Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) IKU tercapai dengan interval capaian kinerja >90% s.d. ≤100% dan berkriteria **“Sangat Tinggi”**;
2. Terdapat 3 (tiga) IKU tidak tercapai, yaitu 2 (dua) indikator dengan interval capaian kinerja >90% s.d. ≤100% dan 1 (satu) indikator dengan interval capaian kinerja >75% s.d ≤90%, yaitu:
 - a. Derajat Fiskal Otonomi Daerah dengan capaian 98,39% atau berkriteria kinerja **“Sangat Tinggi”**;
 - b. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan capaian 82,98% atau berkriteria kinerja **“Tinggi”**;
 - c. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Batam dengan capaian 96,55% atau berkriteria kinerja **“Sangat Tinggi”**

Tabel 3.3
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Kriteria Kinerja
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP PD	71,82	70,97	98,82%	Sangat Tinggi
		2. Indeks pelayanan kesekretariatan PD	91,10	91,46	100,40%	Sangat Tinggi
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana	100%	99,47%	99,47%	Sangat Tinggi

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Kriteria Kinerja
	Pemerintah Daerah	kebutuhan				
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih	10%	12,17%	121,70%	Sangat Tinggi
		2. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	98%	96,48%	98,45%	Sangat Tinggi
		3. Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	25,98%	1,99%	7,66%	Sangat Rendah
		4. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment	16,73%	13,24%	79,14%	Tinggi
		5. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment	16,09%	12,15%	75,51%	Tinggi
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah official assessment	2,76%	12,12%	439,13%	Sangat Tinggi
		2. Rasio Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah	100%	121,70%	121,70%	Sangat Tinggi
		3. Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah Yang Dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Sangat Tinggi
		4. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah self assessment	0,77%	3,55%	461,04%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.3 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 capaian program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator indeks pelayanan kesekretariatan PD mempunyai interval capaian kinerja >90% s.d. ≤100% dan berkriteria “**Sangat Tinggi**”. Angka tersebut didapat

dari hasil survei yang dilakukan pada seluruh pegawai Bapenda atas pelayanan kesekretariatan yang telah diberikan. Sementara untuk indikator kinerja nilai SAKIP PD yang didapat dari penilaian Inspektorat Daerah, masih perlu dioptimalkan lagi di periode selanjutnya. Karena secara realisasi belum mencapai target meskipun interval capaian kinerja >90% s.d. ≤100% dan berkriteria **“Sangat Tinggi”**.

2. Dari 6 (enam) kegiatan penunjang, semua indikator berada pada interval capaian kinerja >90% s.d. ≤100% dan berkriteria **“Sangat Tinggi”**.
3. Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdapat 2 (dua) indikator dengan interval capaian kinerja >90% s.d. ≤100%, 2 (dua) indikator dengan interval capaian kinerja >75% s.d. ≤90%, dan 1 (satu) indikator dengan interval capaian kinerja ≤50%, dengan rincian:
 - a) Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih dengan capaian 121,70% atau berkriteria kinerja **“Sangat Tinggi”**;
 - b) Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target dengan capaian 98,45% atau berkriteria kinerja **“Sangat Tinggi”**;
 - c) Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah dengan capaian 7,66% atau berkriteria kinerja **“Sangat Rendah”**;
 - d) Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment dengan capaian 79,14% atau berkriteria kinerja **“Tinggi”**;

- e) Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment dengan capaian 75,51% atau berkriteria kinerja “**Tinggi**”.
4. Dari 4 (empat) kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, semua indikator berada pada interval capaian kinerja >90% s.d. ≤100% atau berkriteria “**Sangat Tinggi**”.

3.2 Analisa Kinerja

3.2.1 Indikator Kinerja Utama

1. IKU ke-1 : Derajat Fiskal Otonomi Daerah

a. Realisasi Target IKU

Perhitungan derajat fiskal otonomi daerah didapatkan dari penjumlahan realisasi PAD dibagi dengan penjumlahan Pendapatan Daerah. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perhitungan Capaian Derajat Fiskal Otonomi Daerah

No.	Jenis Penerimaan	Realisasi
1	Pendapatan Daerah	4.144.664.860.434,52
2	Pendapatan Asli Daerah	2.253.056.374.966,44
Derajat Fiskal Otonomi Daerah		54,36%
Target Derajat Fiskal Otonomi Daerah		55,25%
Capaian Derajat Fiskal Otonomi Daerah		98,39%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa derajat fiskal otonomi daerah sebesar 54,36% didapat dari realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.253.056.374.966,44 dibagi dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp

4.144.664.860.434,52 dikali 100. Sedangkan capaian derajat fiskal otonomi daerah sebesar 98,39% diperoleh dari realisasi derajat fiskal otonomi daerah sebesar 54,36% dibagi dengan target derajat fiskal otonomi daerah sebesar 55,25% dikali 100.

Berikut tabel rincian realisasi penerimaan dari Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah :

Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

N o	Jenis Pendapatan Daerah	Target	Realisasi	Capaian
1	Pendapatan Asli Daerah	2.364.427.539.406,00	2.253.056.374.966,44	95,29%
2	Pendapatan Transfer	1.920.906.528.285,00	1.880.891.846.186,00	97,91%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.580.652.820,00	10.716.639.282,08	101,28%
JUMLAH		4.295.914.720.511,00	4.144.664.860.434,52	96,48%

* Data berdasarkan LRA Konsolidasi 2025

Tabel 3.6
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

N o	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Target	Realisasi	Capaian
1	Pajak Daerah	1.951.950.293.317,00	1.883.230.865.215,80	96,48%
2	Retribusi Daerah	243.307.558.896,00	173.119.418.654,10	71,15%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.481.402.255,00	9.481.402.255,00	100,00%
4	Lain-lain PAD yang Sah	159.688.284.938,00	187.224.688.841,54	117,24%

N o	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Target	Realisasi	Capaian
	JUMLAH	2.364.427.539.406,00	2.253.056.374.966,44	95,29%

* Data berdasarkan LRA Konsolidasi 2025

Tabel 3.7
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025

N o	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	Capaian
1	Pajak Reklame	24.000.000.000,00	17.771.669.900,00	74,05%
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	4.363.200.000,00	3.388.616.718,00	77,66%
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	275.000.000.000,00	233.608.992.080,00	84,95%
4	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	495.000.000.000,00	540.559.866.591,00	109,20%
5	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	172.975.861.879,00	187.290.945.643,00	108,28%
6	PBJT-Tenaga Listrik	410.725.496.236,00	373.685.190.228,00	90,98%
7	PBJT-Jasa Perhotelan	209.287.362.477,00	173.916.049.629,00	83,10%
8	PBJT-Jasa Parkir	16.362.000.000,00	10.764.707.319,00	65,79%
9	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	51.381.558.086,00	48.084.326.367,80	93,58%
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	121.134.509.647,00	162.820.296.040,00	134,41%
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan	171.720.304.992,00	131.340.204.700,00	76,48%

N o	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	Capaian
	Bermotor (BBNKB)			
JUMLAH		1.951.950.293.317,00	1.883.230.865.215,80	96,48%

* Data berdasarkan LRA Konsolidasi 2025

Tabel 3.8
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025

N o	Jenis Retribusi Daerah	Target	Realisasi	Capaian
Retribusi Jasa Umum		97.287.612.596,00	64.550.543.858,00	66,35%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.768.904.846,00	14.976.776.918,00	89,31%
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	60.000.000.000,00	34.168.780.708,00	56,95%
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.000.000.000,00	15.062.874.848,00	75,31%
4	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	277.927.250,00	55,59%
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	18.707.750,00	54.648.750,00	292,12%
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	9.535.384,00	100,00%
Retribusi Jasa Usaha		18.019.946.300,00	15.023.584.281,00	83,37%
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	600.000.000,00	336.288.037,00	56,05%
8	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	61.446.300,00	49.790.000,00	81,03%
9	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.251.000.000,00	606.540.000,00	48,48%
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	16.107.500.000,00	14.030.966.244,00	87,11%
Retribusi Perizinan Tertentu		128.000.000.000,00	93.545.290.515,10	73,08%
11	Retribusi Persetujuan Bangunan	80.000.000.000,00	48.725.225.915,10	60,91%

N o	Jenis Retribusi Daerah	Target	Realisasi	Capaian
	Gedung			
12	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	48.000.000.000,00	44.820.064.600,00	93,38%
JUMLAH		243.307.558.896,00	173.119.418.654,10	71,15%

* Data berdasarkan LRA Konsolidasi 2025

b. Perbandingan target dan realisasi IKU dengan Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi derajat fiskal otonomi daerah antara tahun 2025 dengan tahun 2024 dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menilai apakah strategi atau kebijakan yang diterapkan efektif dalam mencapai target. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1
Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		% Pertumbuhan
	2024	2025	2024	2025	
Derajat Fiskal Otonomi Daerah	NA	55,25%	48,52%	54,36%	12,04%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target IKU pada tahun 2024 tidak ditampilkan karena IKU derajat fiskal otonomi daerah merupakan periode Renstra Tahun 2025-2029, sedangkan pada

periode Renstra tahun 2021-2026 tidak memakai IKU tersebut, sehingga hanya data realisasi tahun 2024 yang dapat dihitung dan ditampilkan untuk mengukur sejauh mana persentase pertumbuhannya.

Diketahui bahwa persentase pertumbuhan derajat fiskal otonomi daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 12,04%, hal ini dipengaruhi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dijalankan seperti pemeriksaan pajak, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, pemutakhiran data wajib pajak, penggalan potensi pajak daerah baru, dll.

2. IKU ke-2 : Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Realisasi Target IKU

Perhitungan tingkat pertumbuhan PAD didapatkan membandingkan realisasi PAD tahun (n) dengan tahun (n-1). Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.10
Tingkat Pertumbuhan PAD Tahun 2025

No.	Jenis Penerimaan	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024	1.768.618.582.165,19
2	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025	2.253.056.374.966,44
Tingkat Pertumbuhan PAD		27,39%
Target Tingkat Pertumbuhan PAD		33,01%
Capaian Tingkat Pertumbuhan PAD		82,97%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan PAD pada tahun 2025 sebesar 27,39% dari yang ditargetkan sebesar 33,01% atau yang berarti capaian tingkat pertumbuhan PAD terhadap target sebesar 82,97%. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan PAD yang baik.

b. Perbandingan target dan realisasi IKU dengan Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara tahun 2025 dengan tahun 2024 dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menilai apakah strategi atau kebijakan yang diterapkan efektif dalam mencapai target. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2
Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi	
	2024	2025	2024	2025
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	NA	33,01%	15,67%	27,39%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target IKU pada tahun 2024 tidak ditampilkan karena IKU tingkat

pertumbuhan PAD merupakan periode Renstra Tahun 2025-2029, sedangkan pada periode Renstra tahun 2021-2026 tidak memakai IKU tersebut, sehingga hanya data realisasi tahun 2024 yang dapat dihitung dan ditampilkan untuk mengukur sejauh mana persentase pertumbuhannya.

Diketahui bahwa kenaikan tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2024 ke 2025 sebesar 74,79%. Hal tersebut turut dipengaruhi oleh semakin masifnya dunia bisnis di Kota Batam yang mampu menggerakkan roda perekonomian, sehingga dari mulai wajib pajak yang terdaftar semakin banyak serta penerimaan daerah terus bergerak positif.

3. IKU ke-3 : Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Batam

a. Realisasi Target IKU

Perhitungan rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didapatkan dari penjumlahan realisasi pajak daerah dibagi dengan PDRB. Data PDRB yang dipakai merupakan data PDRB atas Dasar Harga Berlaku yang dikalkulasikan dari Triwulan I sampai Triwulan IV sehingga menjadi data PDRB Tahunan. Oleh karena pada saat LKjIP ini dibuat, data PDRB pada TW IV belum dirilis

oleh BPS Kota Batam, maka data PDRB TW IV diasumsikan sama dengan PDRB TW III. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.12
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Batam

No.	Keterangan	Realisasi
1	Pajak Daerah Tahun 2025	1.883.230.865.215,80
2	Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2025	248.084.890.000.000,00
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Batam		0,759%
Target Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Batam		0,783%
Capaian Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Batam		96,95%

* Data PDRB berdasarkan data publikasi pada website BPS Kota Batam

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Batam sebesar 0,759% didapat dari realisasi Pajak Daerah sebesar Rp 1.883.230.865.215,80 dibagi dengan Produk Domestik Regional Bruto sebesar Rp 248.084.890.000.000 dikali 100. Sedangkan capaian rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Batam sebesar 96,95% diperoleh dari realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Batam sebesar 0,759% dibagi dengan target rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Batam sebesar 0,783% dikali 100.

Jika dilihat dari capaiannya, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Batam berada pada interval capaian kinerja >90% s.d. ≤100% dan ber kriteria “**Sangat Tinggi**” walaupun masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu

upaya ekstra yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

b. Perbandingan target dan realisasi IKU dengan Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Batam antara tahun 2025 dengan tahun 2024 dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menilai apakah strategi atau kebijakan yang diterapkan efektif dalam mencapai target. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi IKU 3
Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		% Pertumbuhan
	2024	2025	2024	2025	
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Batam	NA	0,783%	0,604%	0,759%	25,71%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target IKU pada tahun 2024 tidak ditampilkan karena IKU derajat fiskal otonomi daerah rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Batam merupakan periode Renstra Tahun 2025-2029, sedangkan pada periode Renstra tahun 2021-2026 tidak memakai IKU tersebut,

sehingga hanya data realisasi tahun 2024 yang dapat dihitung dan ditampilkan untuk mengukur sejauh mana persentase pertumbuhannya.

Diketahui bahwa persentase pertumbuhan rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Batam dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 25,71%, hal ini turut dipengaruhi oleh beberapa langkah kebijakan Pemerintah Daerah seperti percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, layanan jemput bola, dll.

4. IKU ke-4 : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah

a. Realisasi Target IKU

Perhitungan indeks kepuasan masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah didapatkan dari hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah	90,13	90,13	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah sebesar 90,13

dari target yang ditetapkan sebesar 90,13. Hal ini berarti capaian pada IKU tersebut sebesar 100%. Hasil yang didapat tentu tidak serta merta menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berpuas diri, namun hasil tersebut justru menjadi tantangan tersendiri untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik.

b. Perbandingan target dan realisasi IKU dengan Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi indeks kepuasan masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah antara tahun 2025 dengan tahun 2024 dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana peningkatan kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Target dan Realisasi IKU 4 Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		% Pertumbuhan
	2024	2025	2024	2025	
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah	NA	90,13	89,93	90,13	0,22%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target IKU pada tahun 2024 tidak ditampilkan karena IKU indeks kepuasan masyarakat pada Badan

Pendapatan Daerah merupakan periode Renstra Tahun 2025-2029, sedangkan pada periode Renstra tahun 2021-2026 tidak memakai IKU tersebut, sehingga hanya data realisasi tahun 2024 yang dapat dihitung dan ditampilkan untuk mengukur sejauh mana persentase pertumbuhannya.

Diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 sebesar 89,93 dan pada tahun 2025 sebesar 90,13 hal ini menunjukkan persentase pertumbuhannya sebesar 0,22% Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, aspek penilaian biaya pelayanan dan kompetensi pegawai menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan paling tinggi.

3.2.2 Program dan Kegiatan

1. Program dan Kegiatan Penunjang

Perbandingan target dan realisasi antara tahun 2024 dengan tahun 2025 dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana peningkatan kinerja yang telah dilakukan. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2024 dan 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2024	2025	2024	2025
Program Penunjang Urusan	1. Nilai SAKIP PD	NA	71,82	70,08	70,97
	2. Indeks pelayanan	NA	91,10	NA	91,46

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2024	2025	2024	2025
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	keseekretariatan PD				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	NA	100%	NA	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	NA	100%	NA	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	NA	100%	NA	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	NA	100%	NA	99,57%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	NA	100%	NA	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	NA	100%	NA	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target kinerja pada tahun 2024 tidak ditampilkan karena indikator kinerja di atas merupakan periode Renstra Tahun 2025-2029, sedangkan pada periode Renstra tahun 2021-2026 tidak memakai indikator kinerja tersebut. Dari indikator kinerja di atas, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang mencapai target, 1 (satu) indikator kinerja yang melampaui target, dan 2 (dua) indikator kinerja yang tidak mencapai target.

Khusus untuk indikator kinerja Nilai SAKIP PD, meskipun pada tahun 2024 indikator kinerja tersebut tidak digunakan

pada periode Renstra tahun 2021-2026, namun penilaian SAKIP PD rutin dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Dari perbandingan nilai di atas, nilai SAKIP PD tahun 2025 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa catatan penting yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam perlu melakukan beberapa hal diantaranya:

- a) Melakukan pemantauan secara berkala atas rencana aksi yang telah dibuat;
- b) Mendokumentasikan dengan baik seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan kinerja yang telah dilakukan melalui agenda rapat rutin;
- c) Menyusun kebijakan terkait pemberian *reward and punishment* kepada seluruh pegawai di lingkungan Bapenda;
- d) Melakukan evaluasi SOP minimal sekali dalam satu tahun;
- e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Untuk indikator kinerja indeks pelayanan kesekretariatan PD ini didapat dari penilaian seluruh pegawai atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan, dan Bagian Program. Meskipun hasil penilaian dapat melampaui

target yang telah ditetapkan, pelayanan kesekretariatan harus terus ditingkatkan dalam semua aspek.

Sementara untuk indikator persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan diketahui tidak tercapai sesuai target dikarenakan dalam proses pengadaan terdapat 1 (satu) jenis barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Sehingga dalam perencanaan pada periode berikutnya dianggarkan ulang jenis barang tersebut.

2. Program dan Kegiatan Teknis

Perbandingan target dan realisasi antara tahun 2024 dengan tahun 2025 dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana peningkatan kinerja yang telah dilakukan. Pada pengukuran kinerja ini terdapat 5 (lima) indikator kinerja dari program dan 4 (empat) indikator kinerja dari kegiatan. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 3.17
Capaian Piutang Pajak Daerah yang Tertagih
Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Jumlah Penetapan Piutang Pajak Daerah	Realisasi Piutang	Target Piutang	% Realisasi	Capaian Piutang
2024	Rp 549.938.219.938	Rp 55.778.019.605	NA	10,14%	NA
2025	Rp 585.929.198.506	Rp 71.302.044.253	10%	12,17%	121,70%

Tabel 3.18
Pertumbuhan Indikator Kinerja ke-1
pada Program Teknis Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Realisasi		% Pertumbuhan
		2024	2025	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih	10,14%	12,17%	11,84%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target kinerja pada tahun 2024 tidak ditampilkan karena indikator kinerja di atas merupakan periode Renstra Tahun 2025-2029, sedangkan pada periode Renstra tahun 2021-2026 tidak memakai indikator kinerja tersebut.

Diketahui bahwa persentase piutang pajak daerah yang tertagih sebesar 12,17% dari target 10% atau capaiannya sebesar 121,70%. Dengan capaian tersebut, maka indikator kinerja di atas berada pada interval capaian kinerja >90% s.d. ≤100% dan berkriteria **“Sangat Tinggi”**. Sementara pertumbuhan persentase piutang pajak daerah yang tertagih dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 11,84%, hal ini turut dipengaruhi oleh kegiatan penagihan aktif yang dilakukan bersama dengan Kejaksaan Negeri Batam.

Tabel 3.19
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2025

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Capaian
Pajak Daerah Tahun 2024	Rp 1.423.589.947.986,00	Rp 1.407.050.918.403,15	98,84%
Pajak Daerah Tahun 2025	Rp 1.951.950.293.317,00	Rp 1.883.230.865.215,80	96,47%

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian realisasi pajak daerah tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sedikit mengalami penurunan dari 98,84% ke 96,47% meskipun secara realisasi penerimaannya mengalami kenaikan sebesar Rp 476.179.946.812,65. Kenaikan realisasi ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Roadshow PBB-P2 di 12 kecamatan, layanan jemput bola SI BIJAK, digitalisasi pembayaran pajak daerah, dll.

Setelah diketahui data pendapatan di atas, maka dapat dihitung persentase realisasi pajak daerah terhadap target. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja ke-2
pada Program Teknis Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	100%	98%	98,84%	96,47%	98,84%	98,44%

Dari tabel diatas, diketahui bahwa persentase realisasi pajak daerah terhadap

target tahun 2025 mencapai 98,44%. Angka ini sedikit di bawah pencapaian tahun 2024 sebesar 98,84%. Meskipun demikian, indikator kinerja di atas berada pada interval capaian kinerja >90% s.d. ≤100% dan berkriteria **“Sangat Tinggi”**. Pencapaian ini perlu untuk ditindak lanjuti dengan langkah-langkah strategis agar pencapaian tahun 2026 bisa lebih baik dari periode sebelumnya.

Tabel 3.21
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2025

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Capaian	% Pertumbuhan
Retribusi Daerah Tahun 2024	Rp 193.131.375.383,00	Rp 169.736.535.405,50	87,89%	1,99%
Retribusi Daerah Tahun 2025	Rp 243.307.558.896,00	Rp 173.119.418.654,10	71,15%	

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian realisasi retribusi daerah tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, dimana capaian tahun 2024 sebesar 87,89% sedangkan capaian tahun 2025 hanya sebesar 71,15%. Meskipun secara realisasi penerimaan tahun 2025 naik sebesar Rp 3.382.883.248,60 dari tahun 2024, namun ada Rp 70.188.140.241,90 yang meleset dari target.

Setelah diketahui data pendapatan di atas, maka dapat dihitung persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja ke-3
pada Program Teknis Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	25,98%	1,99%	7,66%

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah hanya sebesar 1,99% dari yang ditargetkan sebesar 25,98% atau capaiannya sebesar 7,66%. Dengan capaian tersebut, maka indikator kinerja di atas berada pada interval capaian kinerja $\leq 50\%$ dan berkriteria “**Sangat Rendah**”. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi pada hampir semua jenis retribusi daerah berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.23
Realisasi Pajak Daerah Official Assessment
Tahun 2024 dan 2025

No	Jenis Pajak Daerah Official Assessment	Realisasi 2024	Realisasi 2025	% Pertumbuhan
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	210.675.460.255,00	233.608.992.080,00	10,89%
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	492.145.582.171,15	540.559.866.591,00	9,84%
3	PBJT-Tenaga Listrik	310.822.499.262,00	373.685.190.228,00	20,22%
JUMLAH		1.013.643.541.688,15	1.147.854.048.899,00	13,24%

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pertumbuhan pajak daerah official assessment sebesar 13,24%. Jenis pajak daerah dengan penyumbang pertumbuhan terbesar adalah PBJT-Tenaga Listrik. Setelah diketahui data pertumbuhan di atas, maka dapat dihitung capaian pertumbuhan pajak daerah official assessment tahun 2025. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.24
Capaian Indikator Kinerja ke-4
pada Program Teknis Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment	16,73%	13,24%	79,14%

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah official assessment sebesar 13,24% dari yang ditargetkan sebesar 16,73% atau capaiannya sebesar 79,14%. Dengan capaian tersebut, maka indikator kinerja di atas berada pada interval capaian kinerja >75% s.d. ≤90% dan berkriteria **“Tinggi”**.

Beberapa alasan yang mendasari pertumbuhan realisasi pajak daerah official assessment ini seperti keberhasilan program relaksasi dan roadshow PBB-P2 dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan pembayaran, tingginya aktivitas jual beli

properti, serta meningkatnya konsumsi tenaga listrik dari masyarakat.

Tabel 3.25
Realisasi Pajak Daerah Self Assessment
Tahun 2024 dan 2025

No	Jenis Pajak Daerah Self Assessment	Realisasi 2024	Realisasi 2025	% Pertumbuhan
1	Pajak Reklame	22.021.756.526,00	17.771.669.900,00	-19,30%
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	2.972.843.334,00	3.388.616.718,00	13,99%
3	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	151.057.054.556,00	187.290.945.643,00	23,99%
4	PBJT-Jasa Perhotelan	159.985.270.298,00	173.916.049.629,00	8,71%
5	PBJT-Jasa Parkir	10.625.865.338,00	10.764.707.319,00	1,31%
6	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	46.744.586.663,00	48.084.326.367,80	2,87%
JUMLAH		393.407.376.715,00	441.216.315.576,80	12,15%

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pertumbuhan pajak daerah official assessment sebesar 12,15%. Jenis pajak daerah dengan penyumbang pertumbuhan terbesar adalah PBJT-Makanan dan/atau Minuman. Sementara untuk jenis pajak reklame justru mengalami penurunan. Setelah diketahui data pertumbuhan di atas, maka dapat dihitung capaian pertumbuhan pajak daerah self assessment tahun 2025. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.26
Capaian Indikator Kinerja ke-5
pada Program Teknis Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment	16,09%	12,15%	75,51%

Dari tabel diatas, diketahui bahwa capaian persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah self assessment sebesar 12,15% dari yang ditargetkan sebesar 16,09% atau capaiannya sebesar 75,15%. Dengan capaian tersebut, maka indikator kinerja di atas berada pada interval capaian kinerja >75% s.d. ≤90% dan berkriteria **“Tinggi”**.

Beberapa alasan kuat yang mendasari pertumbuhan realisasi pajak daerah self assessment tahun 2025 ini seperti adanya peningkatan aktivitas cut and fill jika dibandingkan dengan tahun 2024, peningkatan keterisian hotel berbintang dibandingkan tahun 2024 meskipun secara realisasi belum mencapai target, serta peningkatan daya beli masyarakat dalam hal makanan dan minuman.

Tabel 3.27
Realisasi Jumlah Wajib Pajak Daerah Official
Assessment Tahun 2025

No	Jenis Pajak	Realisasi Wajib Pajak		Pertumbuhan WP
		2024	2025	
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	315.811	355.858	12,68%
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.259	20.990	3,61%

No	Jenis Pajak	Realisasi Wajib Pajak		Pertumbuhan WP
		2024	2025	
3	PBJT-Tenaga Listrik	112	90	-19,64%
JUMLAH		336.182	376.938	12,12%

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pertumbuhan wajib pajak daerah official assessment sebesar 12,12%. Setelah diketahui data pertumbuhan di atas, maka dapat dihitung Rasio capaiannya pada tahun 2025. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja ke-1
pada Kegiatan Teknis Tahun 2025

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah Official Assessment	2,76%	12,12%	439,13%

Dari tabel diatas, diketahui bahwa rasio capaian pertumbuhan wajib pajak daerah official assessment tahun 2025 mencapai 439,13%. Capaian ini membawa indikator kinerja di atas berada pada kriteria kinerja **“Sangat Tinggi”**. Meskipun jumlah WP pada PBJT-Tenaga Listrik berkurang sebesar 19,64% atau 22 WP, namun penurunan tersebut tertutup dari peningkatan jumlah WP dari PBB-P2 yang mencapai 12,68% atau 40.047 WP. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya aktivitas jual beli properti di Kota Batam.

Tabel 3.29
Capaian Piutang Pajak Daerah yang Tertagih
Tahun 2025

Tahun	Jumlah Penetapan Piutang Pajak Daerah	Realisasi Piutang	Target Piutang	Persentase Realisasi	Capaian Piutang
2025	Rp 585.929.198.506	Rp 71.302.044.253	10%	12,17%	121,70%

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian penagihan piutang pajak daerah sebesar 121,70%. Setelah diketahui data capaian di atas, maka dapat dihitung rasio capaian penagihan piutang pajak daerah tahun 2025. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja ke-2
pada Kegiatan Teknis Tahun 2025

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah	100%	121,70%	121,70%

Dari tabel diatas, diketahui bahwa rasio capaian penagihan piutang pajak daerah tahun 2025 mencapai 98,44%. Capaian ini membawa indikator kinerja di atas ber kriteria “**Sangat Tinggi**”.

Tabel 3.31
Capaian Indikator Kinerja ke-3
pada Kegiatan Teknis Tahun 2025

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah yang Dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah yang dihasilkan tahun 2025 mencapai 100%. Capaian ini membawa indikator kinerja di atas berada pada interval capaian kinerja >90% s.d. ≤100% dan berkriteria “**Sangat Tinggi**”. 2 (dua) dokumen ini dihasilkan dari pelaksanaan kajian potensi pajak daerah dan rapat koordinasi nasional pendapatan.

Tabel 3.32
Realisasi Jumlah Wajib Pajak Daerah Self Assessment
Tahun 2025

No	Jenis Pajak	Realisasi WP		Pertumbuhan WP
		2024	2025	
1	Pajak Reklame	7.477	7.564	1,16%
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	23	24	4,35%
3	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.460	1.615	10,62%
4	PBJT-Jasa Perhotelan	240	251	4,58%
5	PBJT-Jasa Parkir	37	41	10,81%
6	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	332	414	24,70%
JUMLAH		9.569	9.909	3,55%

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pertumbuhan wajib pajak daerah self assessment sebesar 3,55%. Setelah diketahui data pertumbuhan di atas, maka dapat dihitung rasio capaiannya pada tahun 2025. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.33
Capaian Indikator Kinerja ke-4
pada Kegiatan Teknis Tahun 2025

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah Self Assessment	0,77%	3,55%	461,04%

Dari tabel diatas, diketahui bahwa rasio capaian pertumbuhan wajib pajak daerah self assessment tahun 2025 mencapai 461,04%. Capaian ini membawa indikator kinerja di atas berada pada kriteria kinerja **“Sangat Tinggi”**. 3 (tiga) jenis pajak daerah dengan penyumbang kenaikan wajib pajak terbanyak adalah Pajak Reklame sebanyak 87 WP, PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebanyak 155 WP, dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebanyak 82 WP.

3.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup proses optimalisasi potensi, keterampilan, dan kemampuan pegawai mencapai tujuan Bapenda. Pemanfaatan SDM yang baik dapat mendukung keberhasilan pencapaian target

Bapenda dan diharapkan SDM Badan Pendapatan Daerah menjadi lebih unggul, berkualitas dan berdaya saing.

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berkomitmen untuk meningkatkan SDM melalui pelatihan dan pengembangan. Dengan menyelenggarakan 5 kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai dan melibatkan 16 peserta, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.34
Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai
Bapenda Tahun 2025

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Pemeriksaan Pajak Daerah	10
2	Juru Sita dan Penagihan Pajak	3
3	Pemantapan Tugas Sekretaris Perangkat Daerah dalam Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	1
4	Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan	1
5	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	1
JUMLAH PESERTA		16

Adapun tujuan dilaksanakan pelatihan tersebut dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan efektif, serta berinovasi untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam. Dalam penyelenggaraan pelatihan, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam bekerja sama dengan beragam entitas seperti Pemerintah Pusat, Instansi Pendidikan maupun organisasi profesional sebagai strategi untuk memperkaya

materi, menghadirkan perspektif baru, serta memperluas jaringan.

3.2.4 Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel Badan Pendapatan Daerah Kota Batam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Berikut adalah website yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam memberikan kemudahan pelayanan:

Tabel 3.35
Sistem Informasi Pajak Daerah

No	Website	Keterangan
1	https://bapenda.batam.go.id	Situs web resmi milik Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pelaporan dan aktivitas yang dijalankan
2	https://siependa.batam.go.id	Sistem Informasi Eksekutif Penerimaan Daerah (SIEPENDA) berfungsi memberikan informasi target dan realisasi penerimaan daerah Kota Batam secara real time yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja
3	https://edaftarpajak.batam.go.id	Sistem informasi yang bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran Wajib Pajak maupun Objek Pajak secara online
4	https://epbb.batam.go.id	Sistem informasi yang digunakan untuk melihat tagihan dan bukti bayar PBB-P2
5	https://esppt.batam.go.id	Sistem informasi yang terintegrasi dengan database PBB, dibangun untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak PBB-P2 dalam informasi kewajiban PBB-P2 terutang serta mencetak SPPT PBB-P2
6	https://ebphtb.batam.go.id	Sistem informasi yang terintegrasi dengan database PBB dan database BPHTB untuk pencatatan realisasi penerimaan BPHTB (<i>host to host</i> dengan Bank

No	Website	Keterangan
		persepsi), terkoneksi dengan Notaris/PPAT dan BPN serta digunakan untuk verifikasi kelengkapan data dan kewajaran pembayaran BPHTB oleh Petugas AR Bapenda
7	https://siependa.batam.go.id	Sistem Informasi Eksekutif Penerimaan Daerah (SIEPENDA) berfungsi memberikan informasi target dan realisasi penerimaan daerah Kota Batam secara real time yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja
8	https://ebilling.batam.go.id	Sistem informasi yang terintegrasi dengan bank untuk mendapatkan kode billing pembayaran pajak self assessment
9	https://esptpd.batam.go.id	Sistem informasi yang membantu wajib pajak dalam melaporkan status pembayaran pajak non PBB-P2 dan BPHTB atau Pajak self assessment (hotel, restoran, hiburan, parkir, PPJ, dan MBLB)
10	https://bendonline.batam.id	Sistem informasi yang digunakan Bapenda dengan OPD Penghasil untuk rekonsiliasi Retribusi Daerah

Selain dari sistem informasi yang digunakan, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam juga mengintegrasikan sistem pembayaran pajak daerah agar proses pelayanan publik semakin mudah. Adapun metode pembayaran yang digunakan antara lain:

Gambar 3.1
Kanal Pembayaran Pajak Daerah



3.2.5 Faktor Keberhasilan dan Penghambat

1. Pajak Daerah

Pada tahun 2025 capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah hanya mencapai 96,47%. Secara capaian, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 98,84%, capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2,40%. Namun jika dibandingkan secara realisasi, tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 33,84% dari tahun 2024. Realisasi pajak daerah tahun 2025 sebesar Rp 1.883.230.865.215,80 dan realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp 1.407.050.918.403,13.

Dari 11 (sebelas) jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, 3 (tiga) jenis pajak mencapai target dan 9 (sembilan) lainnya tidak mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala dan upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2025, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



Pajak Reklame

Kendala

Adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Batam untuk melakukan penertiban reklame yang tak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang, hal ini menyebabkan jumlah titik reklame berkurang dan penerimaan dari sektor pajak reklame turut terimbas.

Upaya

Melakukan penataan ulang reklame yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame.

2



Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kendala

- a) Perlambatan pada sektor konstruksi dan properti yang merupakan sektor paling sensitif terhadap kondisi ekonomi makro;
- b) Adanya tambang-tambang ilegal yang tak berizin.

Upaya

- a) Koordinasi lintas sektoral untuk melakukan penindakan terhadap tambang-tambang ilegal;
- b) Melakukan penagihan aktif;
- c) Melaksanakan pengawasan rutin.

3



Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Kendala

- a) Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran;
- b) Penurunan kemampuan ekonomi Wajib Pajak khususnya Badan Usaha yang mengalami kesulitan melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2;
- c) Petugas kelurahan tidak menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
- d) Basis data PBB-P2 masih belum valid dikarenakan Wajib Pajak enggan untuk melakukan updating data jika luas bangunan bertambah, sehingga total pajak terhutang tetap sama, tidak sejalan dengan pertambahan luas bangunan.

Upaya

- a) Memberikan stimulus pajak daerah berupa pemberian diskon dan penghapusan denda pada periode tertentu;
- b) Memberikan apresiasi wajib pajak taat pajak untuk meningkatkan minat membayar pajak;
- c) Digitalisasi pembayaran PBB-P2;
- d) Melakukan layanan jemput bola pembayaran PBB-P2;
- e) Sosialisasi pajak daerah melalui pertemuan dengan wajib pajak maupun melalui media sosial;
- f) Melakukan penagihan aktif;
- g) Pemutakhiran data objek PBB-P2

4



Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Kendala

- a) Wajib pajak melaporkan harga transaksi lebih rendah dari sebenarnya;
- b) Adanya perbedaan harga pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- c) Banyaknya berkas pengajuan BPHTB menyebabkan proses verifikasi memakan waktu sedikit lebih lama.

Upaya

- a) Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) BP Batam, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b) Melakukan digitalisasi e-BPHTB guna mempermudah pelayanan;

5



PBJT-Makanan dan/atau Minuman

Kendala

- a) Adanya inflasi dari tahun ke tahun sehingga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat;
- b) Adanya kebijakan oleh aplikator yang membatasi akses pemerintah terhadap pemesanan makanan dan minuman melalui aplikasi digital;
- c) Tingkat kepatuhan PBJT Makanan dan/atau minuman masih belum optimal.

Upaya

- a) Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- b) Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- c) Pelaksanaan kegiatan penagihan secara intensif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai tindak lanjut intensifikasi pemungutan dan optimalisasi penerimaan PBJT di tahun 2024.

6



PBJT-Tenaga Listrik

Kendala

Belum tertib administrasinya PT. PLN Batam terkait data pendukung pelaporan SPTPD

Upaya

Berkoordinasi dengan PT. PLN Batam terkait integrasi data

7



PBJT-Jasa Perhotelan

Kendala

- Adanya penurunan tingkat hunian pada hotel berbintang jika dibandingkan pada periode yang sama di Tahun 2024, dengan rata-rata penurunan sebesar 10,31%;
- Tingkat kepatuhan PBJT Jasa Perhotelan masih belum optimal.

Upaya

- Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Pelaksanaan kegiatan penagihan secara intensif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai tindak lanjut intensifikasi pemungutan dan optimalisasi penerimaan PBJT di tahun 2025;
- Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap alat monitoring pajak (tapping box) yang dipasang pada masing-masing objek pajak untuk meningkatkan kepatuhan.

8



PBJT-Jasa Parkir

Kendala

- Rendahnya capaian ini mencerminkan dampak perlambatan aktivitas ekonomi makro di Kota Batam, yang berpengaruh terhadap tingkat mobilitas dan daya beli masyarakat;
- keterbatasan dalam pengawasan serta penertiban pada sektor parkir juga turut mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Upaya

- Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Pelaksanaan kegiatan penagihan secara intensif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai tindak lanjut intensifikasi pemungutan dan optimalisasi penerimaan PBJT di tahun 2025;
- Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap alat monitoring pajak (tapping box) yang dipasang pada masing-masing objek pajak untuk meningkatkan kepatuhan.

9



PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Kendala

- Kelemahan dalam pengawasan dan penertiban Wajib Pajak pada sektor hiburan menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak belum optimal. Hal ini tercermin dari adanya potensi underreporting atau ketidaksesuaian pelaporan omzet riil oleh pelaku usaha;
- Selain faktor pengawasan, rendahnya realisasi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan ketidakakuratan dalam penetapan target, di mana target penerimaan sebesar Rp 51,38 miliar dinilai terlalu optimistis dan belum sepenuhnya didukung oleh data historis omzet maupun proyeksi pertumbuhan ekonomi yang realistis.

Upaya

- Meningkatkan kegiatan pengawasan dan penertiban kepada Wajib Pajak khususnya dalam pelaksanaan kegiatan kesenian dan hiburan;
- Merencanakan dilaksanakannya kajian potensi untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan agar dalam menetapkan target penerimaan jauh lebih akurat.

10



Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kendala

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, bahwa Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB, selanjutnya bersamaan dengan pertumbuhan penjualan dan kepemilikan kendaraan Listrik yang mendapatkan serangkaian insentif fiskal

dari Pemerintah Pusat dan Daerah, turut mempengaruhi laju realisasi penerimaan PKB termasuk berimbas pada penerimaan Opsen PKB secara agregat dan jangka panjang;

- b) Meskipun secara realisasi penerimaan Opsen PKB telah melampaui target, namun sebenarnya penerimaan ini dapat lebih dioptimalkan lagi. Karena Bapenda menilai masih banyaknya kendaraan bermotor yang mati pajak karena dalam penertiban dan penindakannya masih tergolong rendah.

Upaya

- a) Meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk tertib PKB guna meningkatkan kepatuhan;
- b) Merencanakan untuk meningkatkan partisipasi penertiban dan penindakan melalui razia gabungan dengan kerjasama lintas instansi.

11



Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Kendala

- a) Daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor baru masih rendah yang disebabkan oleh kecenderungan masyarakat masih memprioritaskan pada kebutuhan dasar;
- b) Asumsi *potential loss* penerimaan BBNKB yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan kendaraan listrik yang mendapatkan insentif fiskal dari diberlakukannya Permendagri No. 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, yang mana mengamankan Pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ditetapkan 0% dari dasar pengenaan pajak PKB dan BBNKB.

Upaya

- a) Bekerja sama dengan Bapenda Provinsi untuk menetapkan langkah-langkah strategis guna optimalisasi penerimaan BBNKB.

2. Retribusi Daerah

Pada tahun 2025 capaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah hanya mencapai 71,15%. Secara capaian, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 87,89%, capaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 19,04%. Namun jika dibandingkan secara

realisasi, tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,99% dari tahun 2024. Realisasi retribusi daerah tahun 2025 sebesar Rp 173.119.418.654,10 dan realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp 169.736.535.405,50.

Dari 3 (tiga) jenis retribusi daerah yang dipungut oleh OPD Penghasil, tidak satupun retribusi daerah yang dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala dan upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2025, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

① **Retribusi Jasa Umum**

Kendala

- a) Adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Batam yang menggratiskan setiap warga yang ber-KTP Kota Batam untuk berobat secara gratis di Puskesmas, hal ini menimbulkan capaian pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan berkurang;
- b) Pengangkutan sampah belum maksimal dikarenakan tempat pembuangan sampah sempit *overload*, sehingga warga enggan untuk melakukan iuran bulanan secara tertib;
- c) Kurang patuhnya petugas parkir terhadap kebijakan yang telah ditentukan, di mana setiap Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran, seharusnya petugas parkir memberikan karcis, namun kebijakan tersebut belum dijalankan dengan patuh. Sehingga banyak *potential loss* yang disebabkan akibat tidak terbagikannya karcis parkir tersebut, padahal setoran retribusi daerah dari petugas parkir ke Pemerintah Kota Batam berdasarkan karcis yang terbagikan;
- d) Masih banyaknya petugas parkir ilegal;
- e) Masih banyaknya titik lokasi parkir yang belum terdata dan tidak ada petugas parkirnya;
- f) Adanya penurunan tingkat kunjungan masyarakat berbelanja di pasar yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya tingkat kenyamanan kurang, kualitas produk kurang baik, lingkungan pasar yang kurang bersih, metode pembayaran masih banyak yang pakai tunai.

2 Retribusi Jasa Usaha

Kendala

- a) Tidak adanya peningkatan kunjungan kapal di Batam;
- b) Pelaku usaha pemotongan hewan lebih memilih memotong hewan ternaknya di Tempat Potong Hewan (TPH) milik BP Batam dibandingkan dengan Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemerintah Kota Batam, hal ini dikarenakan pelaku usaha sekaligus menyewa kandang hewan ternaknya di TPH, sehingga akan jauh lebih mudah karena dari peternakan hingga penyembelihan dilakukan di tempat yang sama;
- c) Masih rendahnya permintaan atau daya beli masyarakat terhadap daging segar dikarenakan harga yang masih tinggi. Masyarakat lebih memilih membeli daging frozen impor yang harganya lebih terjangkau;
- d) Terdapat tempat-tempat wisata yang masih dalam tahap pemeliharaan serta lokasi wisata yang dinilai kurang menarik di mata wisatawan membuat jumlah kunjungan masih sedikit;
- e) Rusunawa yang ada dinilai kalah saing dengan penyewaan rumah tapak di sekitar rusunawa, baik dari segi kenyamanan dan segi harga;
- f) Adanya penundaan kegiatan pesta rakyat dalam rangka HUT RI Ke-80.

3 Retribusi Perizinan Tertentu

Kendala

- a) Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 dan 28 tahun 2025, terdapat perubahan kebijakan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang awalnya di Kementerian kemudian dilimpahkan ke BP Batam. Perubahan kebijakan ini membuat adanya penyesuaian mekanisme yang dijalankan sehingga proses PBG perlu sedikit waktu yang lebih lama karena banyak berkas pengajuan PBG yang belum melengkapi persyaratan dasar seperti dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Lingkungan;
- b) fluktuasi jumlah pembayaran Dokumen Keterangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) per bulan yang dipengaruhi oleh berakhirnya dan perpanjangan masa kontrak TKA yang tidak berlangsung merata sepanjang tahun.

Upaya

- a) Melakukan koordinasi dengan OPD Penghasil untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memaksimalkan pendapatan;
- b) Monitoring langsung ke OPD Penghasil untuk melakukan pendataan atas objek retribusi yang kemungkinan belum dijadikan objek retribusi;
- c) Mendorong digitalisasi pembayaran retribusi daerah;

- d) Melakukan pengawasan dan rencana tindak lanjut atas kebocoran penerimaan;

e) Melakukan penataan ulang parkir tepi jalan.

3.2.6 Rencana Aksi Tahun Depan

Menyikapi capaian dan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam perlu menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target lainnya secara efektif dan efisien. Rencana aksi yang akan dilaksanakan terdiri dari:

- 1

Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah
Memastikan bahwa penilaian atas objek pajak tertentu dilakukan secara adil, akurat, dan sesuai dengan kondisi aktual. Penilaian ini menjadi dasar yang penting dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- 2

Melaksanakan Penagihan Pajak dengan Melibatkan Kejaksaan Negeri Batam
 - Meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
 - Optimalisasi penerimaan pajak daerah.
- 3

Melaksanakan Kajian Potensi Pajak Daerah
 - Mengidentifikasi potensi yang belum tergarap;
 - Menyusun target pendapatan yang lebih rasional;
 - Menyusun strategi untuk langkah intensifikasi dan ekstensifikasi.
- 4

Melakukan Kajian dan Peninjauan Ulang terhadap Regulasi Perda PDRD
 - Penyesuaian tarif terbaru;
 - Penambahan pasal yang lebih mengikat untuk meningkatkan kepatuhan.
- 5

Pemberian Insentif Pajak Daerah
 - Penghapusan sanksi administrasi berupa pembebasan denda atau bunga;
 - Pemberian diskon pajak daerah atau relaksasi pada periode tertentu.
- 6

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah secara Berkala
 - Memastikan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku;
 - Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah;

3.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Pada Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain :



Kementerian Dalam Negeri

Kota Batam kembali membuktikan diri sebagai daerah berprestasi dengan meraih penghargaan Daerah Perbatasan Terinovatif pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Batam dalam menghadirkan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Yusharto Huntoung, melaporkan bahwa penilaian IGA 2025 melalui proses ketat yang terdiri atas lima tahapan. Penjaringan dilakukan terhadap 36.742 inovasi daerah, kemudian dilanjutkan verifikasi akademik oleh Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, serta sidang pleno final.

Pemberian penghargaan ini tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam melalui salah satu inovasi yang turut menjadi penilaian yaitu POSPBB 2.0: Transformasi Akses Pajak Non Tunai via QRIS.





Pemerintah Kota Batam

Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menggelar Penganugerahan Batam Innovation Award (BIA) 2025 di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (2/12/2025). Kegiatan ini menjadi ajang penghargaan bagi pelaku inovasi di lingkungan Pemko Batam sekaligus mendorong lahirnya ide-ide kreatif untuk meningkatkan daya saing daerah dan kualitas pelayanan publik.

Terdapat enam kategori penghargaan yang diberikan. Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mendapatkan 2 (dua) penghargaan, yaitu:

- Terbaik I kategori Perangkat Daerah Terinovatif;
- Terbaik I Kategori Inovasi Digital – POSPBB 2.0: Transformasi Akses Pajak Non Tunai Via Qris.



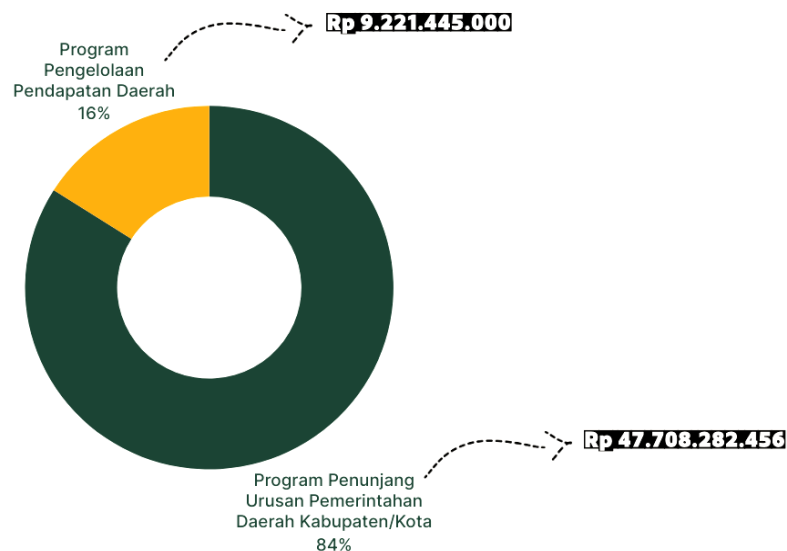
3.4 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Belanja tahun anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Batam ditetapkan sebesar Rp 57.747.432.939 sedangkan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam memiliki anggaran belanja sebesar Rp 56.929.727.456 atau berkurang sebesar 1,42% dari anggaran belanja penetapan.

Gambar 3.2
Gambaran Pendanaan Bapenda Tahun 2025



Gambar 3 3
Pembagian Pendanaan Bapenda Tahun 2025



Realisasi anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah Rp 52.274.775.525 atau 91,82% dari total anggaran belanja pada APBD-P Rp56.929.727.456

Tabel 3.36
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.708.282.456	45.186.764.680	94,71
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.347.194.796	37.685.808.931	95,78
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat	463.703.000	392.720.123	84,69

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Daerah			
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.211.803.500	1.758.610.435	79,51
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.242.622.000	2.067.812.750	92,21
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.240.267.160	2.144.989.172	95,75
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.202.692.000	1.136.823.269	94,52
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.221.445.000	7.088.010.845	76,86
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.221.445.000	7.088.010.845	76,86
TOTAL ANGGARAN		56.929.727.456	52.274.775.525	91,82

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 disusun guna memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didapat dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 4 (empat) target indikator kinerja utama yang diambil dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis, dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat 1 (satu) indikator tercapai dengan interval capaian $>90\%$ s.d $\leq 100\%$ dengan kriteria kinerja “**Sangat Tinggi**” yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah;
2. Terdapat 3 (tiga) indikator tidak tercapai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Derajat Fiskal Otonomi Daerah dengan capaian 98,39% sehingga berada pada interval capaian $>90\%$ s.d. $\leq 100\%$ dengan kriteria kinerja “**Sangat Tinggi**”;
 - b. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan capaian 82,98% sehingga berada pada interval capaian $>75\%$ s.d. $\leq 90\%$ dengan kriteria kinerja “**Tinggi**”;
 - c. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Batam dengan capaian 96,95% sehingga berada pada

interval capaian >90% s.d. ≤100% dengan kriteria kinerja **“Sangat Tinggi”**.

Secara umum capaian seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang positif jika dibandingkan dengan tahun 2024 meskipun masih terdapat 3 (tiga) dari 4 (empat) indikator belum mencapai target yang diharapkan. Pencapaian tersebut disebabkan karena tidak maksimalnya penerimaan daerah pada beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dampak negatif dari perubahan kebijakan pemerintah daerah, penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, dan rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi yang tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, capaian kinerja dengan kriteria tinggi hingga sangat tinggi ini tidak terlepas dari dukungan kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yang menunjukkan realisasi keuangan sebesar Rp 52.274.755.525 atau 91,82% dari total pagu anggaran belanja sebesar Rp 56.929.727.456 yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan penunjang maupun teknis.

Seluruh kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada tahun 2025 akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang, sehingga mampu meningkatkan kinerja secara signifikan di periode selanjutnya.

4.2 Saran

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2024, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah :

1. Melakukan kajian dan penyesuaian ulang regulasi yang digunakan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Melakukan pengembangan teknologi guna meningkatkan kemudahan pelayanan perpajakan;
3. Meningkatkan kegiatan intensifikasi seperti pemutakhiran data wajib pajak, penagihan pajak terhutang, pengawasan kepatuhan pembayaran, dll.
4. Meningkatkan kegiatan ekstensifikasi seperti pendataan wajib pajak atau objek pajak baru;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mengidentifikasi kendala dan segera menentukan langkah strategis penyelesaiannya;
6. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, pemberian insentif perpajakan, penyederhanaan proses bisnis pelayanan, pemberian penghargaan pada wajib pajak taat pajak, dan penegakan hukum;
7. Melakukan koordinasi secara intensif dengan OPD Penghasil terkait komitmen pencapaian target.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAJA AZMANSYAH, S.Sos.,M.T.**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMSAKAR ACHMAD**
Jabatan : Wali Kota Batam
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AMSAKAR ACHMAD

Batam, 28 Agustus 2025

Pihak Pertama,

RAJA AZMANSYAH, S.Sos.,M.T.
NIP. 19701120 20003 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Tingkat Pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Batam	33,01 % 0,783 %
2.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Batam	90,13

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 47.708.282.456	P - APBD 2025
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 9.221.445.000	P - APBD 2025
Jumlah Anggaran		Rp. 56.929.727.456	

Wali Kota Batam,

AMSAKAR ACHMAD

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam,

RAJA AZMANSYAH, S.Sos., M.T.
NIP. 19701120 20003 1 009

INOVASI



TAPPING BOX

Merekam data transaksi Wajib Pajak secara online dan real-time



e-SPTPD

esptpd.batam.go.id
Pelaporan Pajak Daerah secara online



e-DaftarPajak

edaftarpajak.batam.go.id
Pendaftaran Online Pajak Daerah



SIMREK

simrek.batam.go.id
Sistem Informasi Manajemen Reklame



BendOnline 2.0

bendonline.batam.go.id
Digitalisasi Rekonsiliasi Retribusi Daerah



Podcast BiJak

Podcast Bincang Pajak





Roadshow PBB-P2

Layanan jemput bola & Pengundian Doorprize
pada 12 Kecamatan di Kota Batam



SIAP TAGIH

Sinergi Penagihan Aktif
Piutang Pajak Daerah



Si Bijak

"SiBijak Go" Akselerasi kepatuhan pajak
melalui layanan terintegrasi dan
dekat dengan masyarakat



POSPBB 2.0

epbb.batam.go.id

Transformasi akses pajak non tunai
via Qris



e-BPHTB 2.0

ebphtb.batam.go.id

Layanan pengelolaan BPHTB Terintegrasi



DigiTax Listrik

Pemetaan & Digitasi
PBJT Tenaga Listrik